

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG AJAK MASYARAKAT HADAPI HOAKS DENGAN “TUJUH JURUS FAKTUAL”

BANDAR LAMPUNG, 05 Mei 2025 - Dalam menghadapi derasnya arus informasi menjelang momentum politik ke depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengingatkan pentingnya literasi digital dan kewaspadaan terhadap berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan gangguan terhadap kehidupan demokrasi. Melalui kampanye edukatif bertajuk “Hadapi Hoaks dengan Tujuh Jurus Faktual”, Bawaslu Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya persoalan informasi salah, tetapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

“Hoaks bukan sekadar kabar palsu, tetapi bisa menjadi alat provokasi yang membelah masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali, menilai, dan meluruskan informasi yang tidak benar. Bawaslu Lampung berkomitmen untuk terus mengedukasi publik melalui pendekatan literasi faktual,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Bawaslu Lampung merumuskan “Tujuh Jurus Faktual” sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi hoaks di era digital. Tujuh langkah ini dirancang agar mudah diterapkan oleh siapa pun dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang publik maupun di media sosial.



Pertama, Fokus pada Emosi. Hoaks kerap memanfaatkan sisi emosional pembaca dengan menimbulkan rasa marah, takut, atau benci. Dengan mengenali emosi yang muncul saat membaca suatu informasi, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah terpancing.

Kedua, Amati Secara Menyeluruh. Masyarakat diimbau untuk tidak hanya membaca judul berita. Sering kali, hoaks disamarkan melalui judul bombastis yang tidak sesuai dengan isi. Membaca secara utuh membantu memahami konteks sebenarnya dari suatu informasi.

Ketiga, Periksa Kredibilitas Sumber. Dalam era banjir informasi, penting untuk memastikan bahwa sumber berita berasal dari lembaga atau media yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan informasi dari akun anonim atau situs yang tidak memiliki rekam jejak jelas.

Keempat, Gunakan Akal Sehat. Jika suatu informasi terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya, besar kemungkinan itu adalah hoaks. Pemikiran kritis dan logika harus menjadi tameng pertama sebelum membagikan sesuatu ke ruang digital.

Kelima, Ungkap Fakta. Sebelum menyebarkan informasi, biasakan untuk memeriksa kebenarannya melalui kanal periksa fakta yang kredibel atau lembaga resmi, seperti Kementerian Kominfo, Bawaslu, maupun media mainstream yang terverifikasi Dewan Pers.

Keenam, Awasi Penyebar. Waspadaai akun, grup, atau situs yang sering membagikan informasi mencurigakan. Tindakan sederhana seperti melaporkan akun penyebar hoaks dapat mencegah dampak yang lebih luas.

Ketujuh, Luruskan Informasi. Setelah mengetahui bahwa suatu kabar adalah hoaks, masyarakat diharapkan ikut aktif menyebarkan klarifikasi atau fakta yang benar agar tidak terjadi misinformasi berkelanjutan.



Iskardo menegaskan, dalam konteks pengawasan pemilu dan kehidupan berbangsa, Bawaslu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang publik dari pengaruh destruktif informasi palsu.

“Kami tidak hanya bekerja dalam konteks pengawasan tahapan pemilu, tetapi juga memastikan agar masyarakat memiliki daya tahan terhadap manipulasi informasi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika warganya berpengetahuan dan berfakta,” kata Iskardo menambahkan.

Ia juga menyoroti bahwa penyebaran hoaks sering kali meningkat menjelang momen politik, terutama saat isu sensitif seperti agama, suku, dan politik identitas muncul. Oleh sebab itu, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan generasi muda, untuk menjadi “duta kebenaran” di lingkungannya masing-masing.

“Kita tidak bisa melawan hoaks sendirian. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor Seperti pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat budaya verifikasi. Mari kita jadikan ‘Tujuh Jurus Faktual’ ini sebagai panduan bersama dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat di Lampung,” tutupnya.



Melalui kampanye ini, Bawaslu Lampung berharap masyarakat semakin waspada terhadap hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Langkah preventif ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi publik, serta menjaga integritas demokrasi di Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung